

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN SMP

Paningkat Siburian

Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FT Unimed

***Abstrak:** Kemajuan bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan. Pendidikan berkontribusi dalam pengembangan SDM yang bermutu. MBS merupakan pendekatan pengelolaan sekolah dengan memberi kekuasaan kepada kepala sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk perbaikan kinerja sekolah. Strategi dalam Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) menggambarkan arah pengembangan sekolah, sasaran, program-program, biaya yang diperlukan, keterlibatan stakeholder, dan target keberhasilan yang direncanakan. Dalam penyusunan rencana pengembangan SMP harus menerapkan prinsip-prinsip pencapaian prestasi siswa, perubahan yang lebih baik, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, tanggap terhadap perubahan, demand driven, partisipasi, keterwakilan, transparansi, data driven, realistis sesuai dengan hasil analisis SWOT, dan didasarkan pada hasil review dan evaluasi*

Kata kunci: Strategi, Standar Pengelolaan, MBS

Abstract: The development of a nation progress is determined by the quality of its education. Education contributes to the development of qualified human resource. School-based management (MBS) is an approach in managing schools by which the principal is given the authority to involve the society in improving the school performance. The School Development Plan (RPS) describes direction of the school development, the target and the programs, the cost needed, the stakeholder participation, and the targetting success. In designing the plan, some principles must be considered: students' achievement, a better condition, systematicity, right orientation, integrated, as a whole, responsive to changes, demand driven, participation, representativeness, transparency, data driven, realistic and in accordance with the result of SWOT analysis, and based on the result of review and evaluation.

Keywords: strategy, management standard, MBS

A. Pendahuluan

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan. Pendidikan berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu dengan indikator berkualifikasi ahli, terampil, kreatif, inovatif, serta memiliki sikap dan perilaku yang positif.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai suatu lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dituntut untuk dapat memenuhi standar kompetensi lulusan yang memiliki dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lanjutan.

Untuk itu, telah dilakukan berbagai upaya atau kebijakan guna mengembangkan Sekolah Standar Nasional (SSN). Penetapan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi lulusan, Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan, dan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD serta pelaksanaan program sertifikasi guru adalah sebagian dari upaya pemerintah yang diharapkan dapat menjadikan sekolah memenuhi standar nasional pendidikan.

Dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 Bab I, Pasal 1 ditegaskan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Secara rinci dijelaskan bahwa standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar

tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (Direktorat Pembinaan SMP, 2009 : 5 – 6).

Akan tetapi, menurut Erman Suparno bahwa dari kondisi riil terlihat adanya ketimpangan antara kebijakan yang diharapkan dan hasil yang dicapai dalam upaya pemerintah meningkatkan SDM, termasuk kualitas tenaga kerja yang tersedia (Soedijarto, 2008 : XXIII). Hal itu sesuai dengan kenyataan saat ini bahwa sebagian besar SMP belum memenuhi sekolah standar nasional, pada hal dinyatakan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 bahwa Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan. Secara umum, SMP belum memenuhi standar pengelolaan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam SNP yang menjadi tolak ukur kinerja sekolah (Direktorat Pendidikan SMP, 2009 : 79 – 80).

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di SMP sehingga memenuhi standar nasional pendidikan, diperlukan strategi pencapaian standar pengelolaan pendidikan.

B. Pembahasan

1. Pengelolaan SMP dengan Manajemen Berbasis Sekolah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab VIII, Pasal 49, Ayat 1 dijelaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk merancang kembali pengelolaan

sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, kepala sekolah, orangtua siswa dan masyarakat (Nanang Fattah dan Mohammad Ali, 2007:1-5).

Pada intinya, MBS memberikan kewenangan dan pendelegasian kewenangan kepada sekolah untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Dengan mengalihkan wewenang dalam keputusan dari pemerintah tingkat pusat ke tingkat sekolah diharapkan sekolah akan lebih mandiri dan lebih mampu menentukan arah pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan masyarakat.

MBS memiliki karakteristik yang sama dengan sekolah yang efektif, yaitu: 1) memiliki output (prestasi pembelajaran dan manajemen sekolah) yang efektif sebagaimana diharapkan; 2) efektivitas belajar mengajar yang tinggi; 3) peran kepala sekolah yang kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan dan menyeraskan semua sumber daya pendidikan yang tersedia; 4) lingkungan dan iklim belajar yang aman, tertib, dan nyaman; 5) analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kinerja, hubungan kerja, dan imbal jasa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik; 6) pertanggung jawaban sekolah kepada publik tentang keberhasilan program yang telah dilaksanakan; dan (7) pengelolaan dan penggunaan anggaran yang sepantasnya dilakukan oleh sekolah sesuai kebutuhan riil (Syaiful Sagala, 2006 : 136 – 137).

Sehubungan dengan karakteristik tersebut dijelaskan bahwa

efektivitas sekolah menunjuk kepada kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan (Aan Komariah dan Cepi Tritua, 2008 : 8). Azas terpenting yang menjadi landasan dalam pengelolaan pendidikan menuju sekolah efektif adalah pernyataan bahwa semua siswa dapat belajar. Hal ini berarti bahwa semua upaya manajemen dan kepemimpinan yang terjadi di sekolah diarahkan bagi usaha membuat siswa dapat belajar.

Ada delapan prinsip dalam pelaksanaan MBS, yaitu: 1) komitmen, kepala sekolah dan warga sekolah harus mempunyai komitmen yang kuat untuk berMBS; 2) kesiapan, semua warga sekolah harus siap fisik dan mental untuk berMBS; 3) keterlibatan, pendidikan yang efektif melibatkan semua pihak dalam mendidik anak; 4) kelembagaan, sekolah sebagai lembaga adalah unit terpenting bagi pendidikan yang efektif; 5) keputusan, segala keputusan sekolah dibuat oleh pihak yang benar-benar mengerti tentang pendidikan; 6) kesadaran; 7) kemandirian, dan 8) ketahanan (Husaini Usman, 2008:574).

MBS bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian wewenang, kelwesan, dan sumber daya guna meningkatkan mutu sekolah (Ibrahim Bafadal, 2006:84). Secara rinci dijelaskan bahwa tujuan manajemen berbasis sekolah adalah: 1) efisiensi; 2) keefektifan; dan 3) tanggung jawab (Levavic, 1991:86). Dengan kemandiriannya, sekolah diharapkan: 1) dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya, sehingga berdasarkan hal tersebut berusaha mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolah; 2) dapat

mengembangkan sendiri program-program sesuai kebutuhannya; 3) dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan; dan 4) dapat melakukan persaingan sehat dengan sekolah lain dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Jadi, pengelolaan SMP dengan MBS adalah suatu sistem pengelolaan satuan pendidikan yang memberi kewenangan kepada sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program-program yang sesuai dengan kondisi objektifnya melalui keterbukaan manajemen, iklim kerja yang kondusif, dan kerja sama sinergis antara semua pelanggannya, sehingga menyebabkan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

2. Pencapaian Standar Pengelolaan Pendidikan di SMP

Untuk mengatasi masalah pengelolaan pada SMP yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP), diperlukan strategi pencapaian standar pengelolaan pendidikan. Pada hakikatnya, strategi pencapaian standar pengelolaan pendidikan merupakan cara dan upaya untuk merubah pengelolaan pendidikan pada SMP saat ini menuju Sekolah Standar Nasional yang diharapkan masa datang berdasarkan kesenjangan yang ada. Strategi adalah ilmu dan seni untuk memanfaatkan faktor-faktor lingkungan eksternal secara terpadu dengan faktor-faktor lingkungan internal untuk mencapai tujuan lembaga (P. Siburian, 2009:5).

Sehubungan dengan itu dikemukakan bahwa penentuan suatu strategi yang berhasil selalu memiliki pertanyaan berikut: 1) Di mana kita berada sekarang ?, 2) Di mana kita ingin berada di masa datang ?, 3)

Bagaimana kita mengukur kemajuan ?, 4) Bagaimana kita mencapai sasaran dan tujuan ?, 5) Bagaimana kita menelusuri kemajuan ? (Vincent Gaspersz, 2004:12).

Dalam pengelolaan pendidikan, strategi harus dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS-1) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS-2) atau Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) yang menggambarkan arah pengembangan sekolah, sasaran, program-program, biaya yang diperlukan, keterlibatan stakeholder, dan target keberhasilan yang direncanakan (Direktorat Pembinaan SMP, 2009 : 81). Dalam penyusunan RKAS-1 dan RKA-2 sebagai Rencana Pengembangan SMP harus menerapkan prinsip-prinsip pencapaian prestasi siswa, perubahan yang lebih baik, sistematis, terarah, terpadu (Saling terkait dan sepadan), menyeluruh, tanggap terhadap perubahan, demand driven (berdasarkan kebutuhan), partisipasi, keterwakilan, transparansi, data driven, realistik sesuai dengan hasil analisis SWOT, dan didasarkan pada hasil review dan evaluasi. Selain itu, pembuatan Rencana Pengembangan Sekolah harus mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi, seperti kondisi lingkungan strategis, kondisi SMP saat ini, dan harapan masa yang akan datang. Untuk itu, alur berpikir dan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sekolah digambarkan seperti pada Gambar 1.

Berdasarkan uraian di atas dilakukan langkah-langkah penyusunan rencana strategi (RKAS-1) sebagai berikut: 1) Melakukan analisis lingkungan strategis sekolah. Pihak sekolah melakukan kajian tentang

faktor eksternal yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan, antara lain: kondisi sosial, ekonomi, politik, keamanan, geografis, perkembangan IPTEK dan kebijakan pemerintah untuk menentukan visi sekolah; 2) Melakukan analisis situasi pendidikan SMP saat ini. Pihak sekolah melakukan kajian tentang manajemen sekolah saat ini yang belum memenuhi standar pengelolaan pendidikan; 3) Melakukan analisis situasi pendidikan SMP yang diharapkan 4 tahun ke depan. Pihak sekolah bersama semua stakeholder melakukan kajian tentang standar pengelolaan pendidikan yang akan dicapai di masa mendatang; 4) Menentukan kesenjangan pengelolaan pendidikan saat ini dan yang diharapkan 4 tahun ke depan; 5) Merumuskan visi sekolah. Visi adalah imajinasi moral yang menggambarkan profil sekolah yang diinginkan di masa depan. Contoh : SMP yang unggul mengelola pendidikan guna terwujudnya insan kamil. Berdasarkan visi tersebut dirumuskan salah satu indikator visi : Terwujudnya standar pengelolaan pendidikan bertaraf nasional; 6) Merumuskan misi sekolah. Misi adalah tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Contoh: Mewujudkan standar pengelolaan pendidikan bertaraf nasional; 7) Merumuskan tujuan sekolah. Bertolak dari visi dan misi dirumuskan tujuan sekolah sebagai rintisan SSN. Contoh: sekolah mampu memenuhi/menghasilkan standar pengelolaan pendidikan bertaraf nasional; 8) Merumuskan program-program strategis untuk mencapai visi, misi, dan tujuan jangka menengah sebagai SSN. Programnya belum operasional hanya garis besarnya saja, untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana operasional 1 tahun (RKAS –

2). Contoh: Pemenuhan standar pengelolaan bertaraf nasional; dan 9) Menentukan strategi pencapaian. Setelah program dirumuskan selanjutnya adalah menentukan strategi pencapaian/pelaksanaan program secara efektif dan efisien. Karakteristik strategi sesuai dengan tuntutan program serta mempertimbangkan keterlibatan pihak terkait.

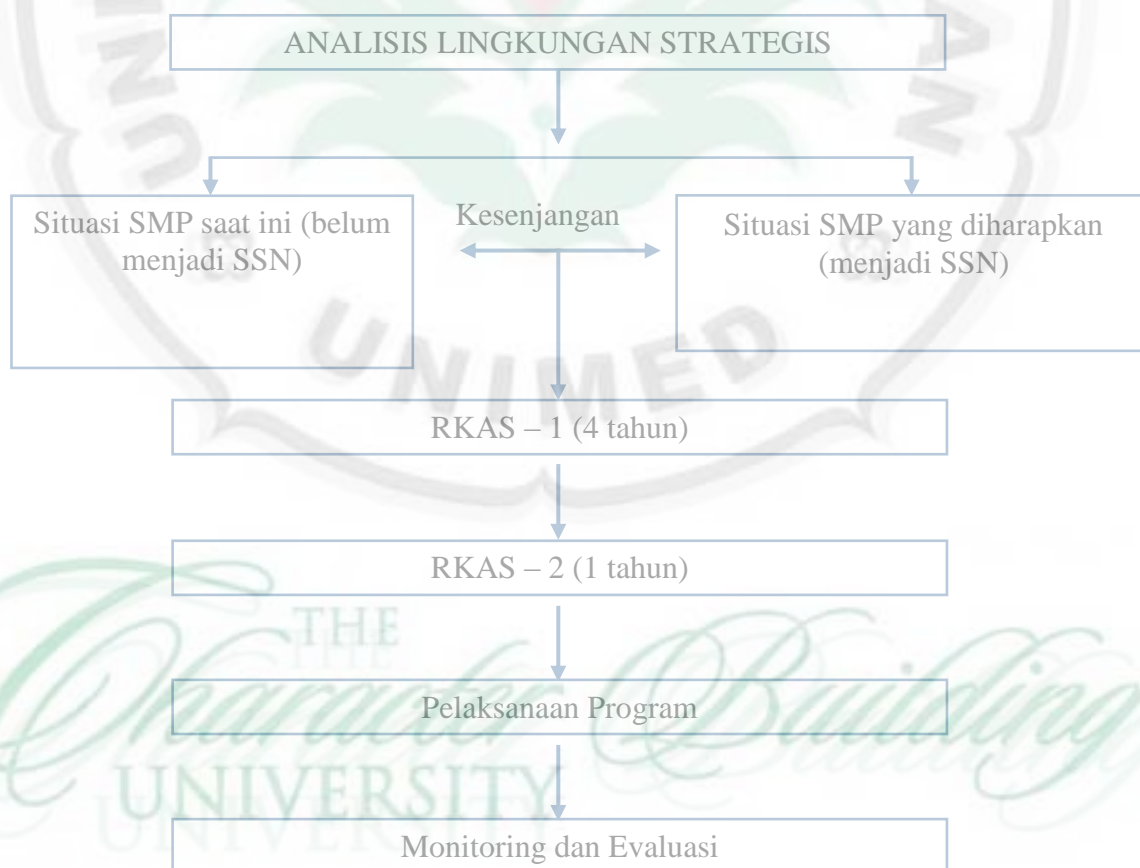
Ada lima strategi pencapaian standar pengelolaan pendidikan bagi SMP untuk mencapai SSN, yaitu : 1) Melaksanakan MBS, Dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 Bab VIII, Pasal 49, Ayat 1 disebutkan bahwa pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan MBS yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas; 2) Mengembangkan inovasi pembelajaran, MBS merupakan wahana untuk mendorong sekolah melakukan inovasi pembelajaran guna meningkatkan mutu pendidikan. Inovasi pembelajaran dapat meliputi pembelajaran kontekstual, pembelajaran berbasis masalah dan pendidikan kecakapan hidup; 3) Mengembangkan lingkungan sekolah yang kondusif. Program kebersihan, ketertiban, keindahan, kerindangan, keamanan, kekeluargaan, dan keteladanan guru dapat diarahkan untuk menumbuhkan situasi sekolah yang kondusif bagi perkembangan komunitas belajar; 4) Mengembangkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan. Peningkatan kualitas guru tidak berhenti pada guru menjadi pandai, tetapi harus sampai guru mampu menunjukkan kinerja profesional; 5) Menggalang partisipasi masyarakat. SSN harus berupaya keras menggalang partisipasi masyarakat guna mendukung program sekolah.

Partisipasi akan mudah ditumbuhkan, jika mereka terlibat dalam membuat perencanaan kebijakan/keputusan yang akan dituangkan dalam RKAS – 1 dan RKAS – 2 ;

Kemudian langkah selanjutnya yang kesepuluh yaitu: Menentukan tonggak-tonggak kunci keberhasilan. Berdasarkan tujuan, program, dan strategi pencapaian di atas, dirumuskan hasil yang diharapkan. Contoh: Terealisasinya standar pengelolaan pendidikan bertaraf nasional; 11) Menentukan rencana biaya (alokasi dana). SMP sebagai rintisan SSN merencanakan alokasi

anggaran biaya untuk kepentingan 4 tahun; 12) Membuat rencana pemantauan dan evaluasi. Program ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari program standar pengelolaan.

SMP sebagai rintisan SSN harus merumuskan rencana supervisi, monitoring internal dan evaluasi internal sekolahnya oleh kepala sekolah dan tim yang dibentuk sekolah untuk kurung waktu 4 tahun. Dengan demikian, dapat diperbaiki kelemahan proses serta diketahui keberhasilan atau kegagalan tujuan sebagai rintisan SSN.



Gambar 1.
Penyusunan dan Pelaksanaan Perencanaan Sekolah

Selanjutnya, berdasarkan Rencana Strategis 4 Tahun (RKAS – 1) disusun Rencana Operasional 1 Tahun (RKAS – 2). Adapun langkah-langkah penyusunan Rencana Operasional 1 tahun (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) adalah sebagai berikut: 1) Melakukan analisis lingkungan operasional sekolah; 2) Melakukan analisis pendidikan sekolah saat ini; 3) Melakukan analisis pendidikan sekolah yang diharapkan satu tahun ke depan; 4) Merumuskan kesenjangan antara pendidikan sekolah saat ini dan satu tahun ke depan; 5) Merumuskan tujuan tahunan sebagai tujuan jangka pendek (sasaran); dan 6) Mengidentifikasi fungsi-fungsi atau urusan-urusan sekolah untuk dikaji tingkat kesiapannya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu: a) Melakukan analisis SWOT ; b) Menyusun langkah-langkah pemecahan masalah untuk mengubah ketidaksiapan menjadi kesiapan urusan sekolah; c) Menyusun rencana program sekolah; d) Menentukan milestone (output apa dan kapan dicapai); e) Menyusun rencana biaya (besar dana, alokasi, dan sumber dana); f) Menyusun rencana pelaksanaan program; g) Menyusun rencana pemantauan dan evaluasi; h) Membuat jadwal pelaksanaan program; dan i) Menentukan penanggung jawab program/kegiatan.

Program dan kegiatan yang dapat dikembangkan pada standar pengelolaan pendidikan di SMP antara lain: 1) Pengembangan atau pembuatan RKAS – 1 dan RKAS – 2; 2) Pengembangan pendayagunaan SDM sekolah dengan cara membuat dan membagi tugas secara jelas; 3) Pengembangan struktur dan keorganisasian sekolah sesuai dengan

kebutuhan sekolah; 4) Melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien ; 5) Implementasi MBS; 6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh sekolah; 7) Membuat jaringan informasi akademik; 8) Membuat jaringan kerja yang efektif dan efisien, baik secara vertikal dan horizontal; 9) Implementasi model manajemen PDCA dan model lainnya; 10) Mengembangkan *Income Generating Activities* atau unit produksi/usaha di sekolah; 11) Penggalangan partisipasi masyarakat melalui pendayagunaan komite sekolah (Direktorat Pembinaan SMP, 2009 : 50 – 51).

Selanjutnya, target-target yang harus dicapai pada standar pengelolaan pendidikan di SMP ditunjukkan oleh indikator-indikator: 1) Terdapat dokumen RKAS-1 dan RKAS-2; 2) Terdapat dokumen pengembangan SDM sekolah ; 3) Terdapat dokumen struktur dan keorganisasian sekolah; 4) Terlaksananya pembelajaran yang efektif dan efisien; 5) Mengimplementasikan MBS; 6) Terlaksananya monev; 7) Terdapat jaringan informasi akademik (SIM) ; 8) Terdapat jaringan kerja yang efektif dan efisien; 9) Terdapat berbagai model pengembangan pengelolaan sekolah; 10) Terdapat sistem pengelolaan dalam *Income Generating Activities*; dan 11) Terselenggaranya penggalangan masyarakat secara optimal dalam berbagai bentuk/bidang (Direktorat Pembinaan SMP, 2009 : 52 – 53).

C. Penutup

Strategi pencapaian standar pengelolaan SMP adalah cara dan upaya untuk merubah pendidikan pada SMP saat ini menuju Sekolah Standar Nasional yang diharapkan masa datang berdasarkan kesenjangan yang ada

dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah. Pencapaian standar pengelolaan ditandai dengan perolehan hasil sebagai berikut : (1) tersusunnya program-program yang dalam upaya pengembangan manajemen sekolah sesuai dengan rambu-rambu MBS; (2) diimplementasikannya model manajemen berbasis sekolah secara penuh ; (3) terdapat jalinan kerja sama dengan sekolah sejenis dan identik karakteristiknya ; (4) terbangunnya model kepemimpinan yang kuat dan akuntabel, dan (5) terciptanya model manajemen yang memiliki kemandirian yang tinggi.

Daftar Pustaka

- Aan Komariah dan Capi Triatna. 2008. *Visioner Leadership Menuju Sekolah Efektif*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Direktorat Pembinaan SMP. 2009. *Panduan Pelaksanaan Sekolah Standar Nasional (SSN)*. Jakarta : Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Husaini Usman. 2008. *Manajemen Teori Praktik & Riset Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Gaspersz, Vincent. 2004. *Perencanaan Strategik Untuk Peningkatan Kinerja Sektor Publik. Suatu Petunjuk Praktek..* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Ibrahim Bafadal. 2006. *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar Dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Levavic, R. 1995. *Local Management of Schools. Analysis and Practice*. Buckingham : Open University Press.
- Nanang Fattah dan H. Mohammad Ali. 2007. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Sagala, Syaiful. 2006. *Manajemen Berbasis Sekolah & Masyarakat. Strategi Memenangkan Persaingan Mutu*. Jakarta : Nimas Multima.
- Siburian, Paningkat. 2009. *Implementasi Soft Skills dalam Pembelajaran*. Medan: Politeknik MBP Medan.
- Soedijarto. 2008. *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta : Kompas.